

**EVALUASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN PROGRAM BANTUAN BERAS  
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DI DESA NGERANGAN  
KECAMATAN BAYAT**

**Anisa Tri Nur Fauzani<sup>1</sup>, Arnetta Rara Said<sup>2</sup>, Tri Mardiana<sup>3</sup>**

Program Studi Administrasi Publik  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani

[anishatri63@gmail.com](mailto:anishatri63@gmail.com), [arnettararas@gmail.com](mailto:arnettararas@gmail.com), [nanakecild@gmail.com](mailto:nanakecild@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to evaluate the Government's Food Reserve rice assistance program using P3KE data in Ngerangan Village, Bayat District. This program is to address the El Nino phenomenon which has the potential to hinder food production in Indonesia. The Indonesian government's National Food Agency through the CPP program focuses on reducing the risk of the El Nino phenomenon and maintaining people's purchasing power to meet their food needs. This research method uses a qualitative research type with a case study approach. The evaluation method used is Result-Based Management (RBM) with input, activity, output, outcome and impact indicators. The results of the study show that in the Input indicator, the amount of rice distributed is 10 (ten) kilograms of rice per KPM with the number of distributors being 6 village officials and PKH officers and the number of CPP recipients is approximately 800 families. Activity indicator, the CPP program in Ngerangan Village is implemented in two stages and its implementation is running smoothly in accordance with Presidential Regulation Number 125 of 2022. Output indicator, shows that the results of the CPP program are that each KPM gets ten kilograms of rice. Outcome Indicator, the community feels helped and happy because in 2024 the community experienced crop failure so that the CPP program greatly helps the community in meeting food needs. Impact Indicator, this CPP program only answers the needs of the community due to the El Nino phenomenon and crop failure, in the long term this CPP program does not consider the needs of the community for the future after the CPP program policy is stopped. The need for collaboration with local and village governments, by updating data regularly to ensure the accuracy and relevance of P3KE data.*

**Keywords:** Government Food Reserves, Evaluation, Food Security, RBM Evaluation Model

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang menggunakan data P3KE di Desa Ngerangan Kecamatan Bayat. Program ini untuk menjawab fenomena El Nino yang memiliki potensi menghambat dalam produksi pangan di Indonesia. Badan Pangan Nasional Indonesia melalui program CPP berkonsentrasi pada mengurangi risiko fenomena El Nino dan mempertahankan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode evaluasi yang digunakan adalah *Result-Based Management* (RBM) dengan indikator *input*, *activity*, *output*, *outcome* serta *impact*. Hasil penelitian menunjukkan pada indikator *Input*, jumlah beras yang didistribusikan ialah 10 (sepuluh) kilogram beras per KPM dengan jumlah pendistribusi 6 perangkat desa dan petugas PKH serta jumlah penerima CPP kurang lebih 800 KK. Indikator *Activity*, program CPP di Desa Ngerangan dilaksanakan dalam dua tahapan serta pelaksanaannya berjalan dengan lancar sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022. Indikator *Output*, menunjukkan bahwa hasil dari program CPP setiap KPM mendapatkan beras sepuluh kilogram. Indikator *Outcome*, masyarakat merasa terbantu dan senang karena pada tahun 2024 masyarakat mengalami gagal panen sehingga dengan adanya program CPP sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Indikator *Impact*, program CPP ini hanya menjawab kebutuhan masyarakat akibat fenomena El Nino dan kegagalan panen, untuk jangka panjang program CPP ini kurang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat untuk masa mendatang setelah kebijakan program CPP ini dihentikan. Perlunya kolaborasi dengan pemerintah daerah dan desa, dengan melakukan pemutakhiran data secara berkala untuk memastikan keakuratan dan relevansi data P3KE.

**Kata Kunci:** Cadangan Pangan Pemerintah, Evaluasi, Ketahanan Pangan, Model Evaluasi RBM

## PENDAHULUAN

Sebagai anggota PBB, Indonesia berdedikasi dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) guna mencapai kesejahteraan ekonomi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menjadikan permasalahan pangan sebagai prioritas utama untuk dibahas pada tahun 2030, khususnya terkait dengan Tujuan 2 SDGs, yang mencakup peningkatan nutrisi, pencapaian ketahanan pangan, dan penghapusan kelaparan serta pengembangan sektor pertanian berkelanjutan (WHO, 2015). Sejak tahun 2015, terdapat kekhawatiran mengenai masalah kelaparan global dan kerawanan pangan yang disebabkan oleh pandemi, konflik, perubahan iklim, dan kesenjangan (WHO, 2015).

Fenomena El Niño adalah fenomena alam berulang yang terjadi di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik. Ini dicirikan oleh kenaikan suhu laut yang tidak biasa. Untuk mencapai ketahanan pangan berkelanjutan di Indonesia, ini adalah salah satu bentuk perubahan iklim yang paling sulit (Triani & Magello, 2024). Pola cuaca global sering dipengaruhi oleh fenomena El Niño, yang menyebabkan perubahan besar dalam suhu atmosfer, pola hujan, dan arah angin di banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia (Putranto, 2021; Saefudin, 2023).

Langkah-langkah yang direncanakan diperlukan untuk mengatasi dampak perubahan iklim agar ekonomi dan sosial tidak bergejolak. Langkah-langkah strategis ini akan menghadapi penurunan produksi pertanian dan lonjakan harga pangan (Saefudin, 2023).

Dalam pemenuhan kebutuhan pangan rakyat, Badan Pangan Nasional pemerintah Indonesia berusaha untuk mengurangi risiko fenomena El Niño dan mempertahankan daya beli masyarakat, terutama bagi ekonomi menengah ke bawah. Memberikan beras sebagai bagian dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) adalah salah satu tindakan yang dilakukan. Akan berlangsung dari Januari hingga Juni 2024. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan membantu program ini menekan harga beras bagi konsumen dan menjaga inflasi nasional (Kemenko Perekonomian RI, 2024).

Survei yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menunjukkan bahwa Efektifitas Program Bantuan Sosial (SEPBS), yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada Desember 2021, menunjukkan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kurang efektif dalam membantu kelompok yang sangat miskin. Ini disebabkan oleh fakta

bahwa tidak ada variabel pemeringkatan yang dapat digunakan untuk menentukan keluarga yang masuk ke dalam target pengentasan kemiskinan ekstrem. Tidak adanya variabel pemeringkatan ini meningkatkan kemungkinan bahwa bantuan sosial akan dibocorkan ke keluarga yang lebih kecil. Akibatnya, bantuan sosial yang diberikan kurang efektif. Data Sasaran Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang memuat informasi tingkat kesejahteraan keluarga digunakan untuk menyiasati hal tersebut (Adji dkk., 2022). Alhasil, pemerintah kini menggunakan data P3KE dibandingkan DTKS untuk menghitung sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada program bantuan pangan beras CPP tahun 2024.

Meskipun demikian, masalah utama adalah ketidaksesuaian antara data P3KE dan kondisi lapangan sebenarnya. Seperti yang terjadi di Desa Ngerangan Kecamatan Bayat, menunjukkan bahwa distribusi bantuan beras tidak selalu tepat sasaran, dengan sejumlah penerima yang tidak memenuhi kriteria atau sebaliknya, kelompok yang membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan. Artinya, meskipun telah dilakukan upaya untuk meningkatkan akurasi data dengan data P3KE, masih ada perbedaan antara tujuan program dan hasilnya.

Oleh karena itu, analisis menyeluruh diperlukan untuk memahami dinamika program bantuan pangan beras CPP yang menggunakan data P3KE sebagai basis penargetan sasaran program. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah, dengan fokus pada aspek monitoring dan evaluasi kebijakan. Penelitian ini akan mengidentifikasi keberhasilan, kendala, dan dampak yang ditimbulkan oleh program tersebut terhadap ketahanan pangan di tingkat masyarakat. Penelitian ini menggunakan model evaluasi *Result Based Management* (RBM) melalui 3 fase yaitu fase *Planning*, fase *Monitoring*, dan fase *Evaluation*. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan program di masa depan, guna mencapai tujuan ketahanan pangan yang lebih berkelanjutan dan menyeluruh.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), evaluasi dapat didefinisikan sebagai proses atau penilaian untuk menemukan nilai layanan informasi atau produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau pengguna. Selain itu, evaluasi juga dapat didefinisikan sebagai pengumpulan dan pengamatan berbagai macam bukti untuk mengukur pengaruh

dan efektivitas suatu objek, program, atau proses terhadap spesifikasi dan persyaratan pengguna yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data dari proses monitoring, maka kegiatan tersebut terkait erat dengan kegiatan pemantauan. Tujuan evaluasi adalah untuk mengatur dan mengatur pencapaian tujuan. Evaluasi memberikan ringkasan manfaat suatu kebijakan dan terkait dengan temuan informasi terkait nilai.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengukur dan mengukur kinerja agar secara efisien mencapai hasil yang diinginkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pemantauan dan evaluasi terutama berfokus pada masukan dan proses implementasi, serta peran elemen-elemen terkait dalam hasil kinerja dalam hal kuantitas dan kualitas, kolaborasi, advokasi, serta proses kebijakan dan pengambilan keputusan.

*Result Based Management (RBM)* memungkinkan aktor atau pemangku kepentingan yang ada untuk berkontribusi terhadap hasil yang diinginkan secara langsung atau tidak langsung (United Nations Development Group, 2011). RBM meninjau apa yang perlu dilakukan pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Proses RBM terdiri

dari tiga fase: fase *Planning*, fase *Monitoring*, dan fase *Evaluation*.

Pada fase *planning* melibatkan penentuan tujuan, termasuk menetapkan pemahaman umum tentang proyek saat ini dan hasil yang diharapkan. Selain itu juga diuraikan kerangka RBM yang mencakup tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Pada *Fase monitoring dan evaluation* mencakup pengelolaan dan pelaksanaan tindakan pemangku kepentingan serta proses pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap tindakan sejalan dengan hasil yang telah ditentukan pada tahap perencanaan. Temuan evaluasi akan digunakan sebagai landasan untuk menentukan pendapat dan tujuan yang akan ditetapkan selanjutnya dalam proses tersebut.. Pada fase *evaluation* terdapat *input, activity, output, outcome* serta *impact*.



*Input* merujuk pada sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan program atau proyek, seperti dana, tenaga

kerja, bahan baku, peralatan, dan infrastruktur lainnya. Evaluasi *input* bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia cukup dan digunakan secara efektif untuk mendukung pencapaian hasil yang diinginkan. *Activity* merujuk pada kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka program. Evaluasi *activity* mengukur sejauh mana kegiatan yang telah direncanakan dijalankan sesuai dengan jadwal, anggaran, dan standar yang diinginkan. *Output*, *outcome*, dan *dampak* adalah hasil-hasil pada tataran/level yang berbeda. *Output* ada pada level yang pertama, sebagai hasil yang langsung terlihat sesaat setelah kegiatan-kegiatan telah dilaksanakan. *Outcome* berada pada level berikutnya, sebagai hasil lanjutan setelah *output*, dan biasanya membutuhkan adanya perubahan-perubahan perilaku dari pihak yang ditargetkan atau diharapkan 'menggunakan' *output* lebih lanjut. Sedangkan *dampak* biasanya meliputi perubahan yang terasa oleh masyarakat yang lebih luas sebagai sebuah manfaat sosial, fisik, ekonomi ataupun lingkungan/ekosistem.

Beberapa negara menganggap ketahanan pangan sangat penting secara strategis karena menunjukkan bahwa tidak ada negara yang dapat melakukan

pembangunan secara menyeluruh sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan. Agar masyarakatnya dapat bertahan, setiap negara membutuhkan makanan. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjamin keamanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang sangat memperhatikan masalah gizi. Pemerintah membentuk Badan Pangan Nasional dengan Perpres Nomor 66 Tahun 2021.

*United Nations' Committee on World Foods Security* tentang Ketahanan Pangan Dunia, Semua orang memiliki akses fisik, sosial, dan finansial terhadap makanan sehat yang cukup yang memenuhi kebutuhan dan selera mereka dikenal sebagai ketahanan pangan. Ketersediaan pangan yang cukup, baik kuantitas maupun kualitasnya, aman, bervariasi, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama atau kepercayaan, serta budaya masyarakat, merupakan prasyarat bagi ketahanan pangan. Hal tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yang memungkinkan negara dan individu hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan Pangan dan Gizi didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015 sebagai keadaan terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bangsa dan perseorangan, yang

dibuktikan dengan tersedianya pangan yang cukup, aman, beragam, terdistribusi secara tepat, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan, atau budaya masyarakat. untuk mencapai status gizi optimal sehingga memungkinkan individu menjalani gaya hidup berkelanjutan, aktif, dan bermanfaat.

Program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) adalah persediaan bahan pangan pokok yang dikelola oleh pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan. Program CPP merupakan instrumen penting dalam menghadapi tantangan produksi, distribusi, dan harga pangan. Di Indonesia, cadangan pangan pemerintah dikelola oleh BULOG untuk beras. Selain itu, ada juga cadangan pangan pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menyebutkan bahwa cadangan beras masyarakat dan pemerintah merupakan cadangan beras negara. Untuk memenuhi kebutuhan pangan di rumahnya, rumah tangga komunal mengatur persediaan berasnya sendiri. Sebaliknya, cadangan beras yang dikendalikan pemerintah dikelola oleh pemerintah untuk memastikan bahwa biaya dan pasokan pangan dalam negeri terkendali dan berfungsi sesuai rencana. Swasta dan

koperasi diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan cadangan beras dalam rangka mewujudkan cadangan beras nasional.

Menurut peraturan menteri pertanian tentang penetapan jumlah cadangan beras pemerintah daerah yaitu beras adalah padi yang telah terkupas kulitnya, cadangan beras nasional adalah persediaan beras di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia yang didalamnya terdapat cadangan beras pemerintah daerah provinsi dan cadangan pemerintah kabupaten atau kota, yang digunakan untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan beras, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.

Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, terutama dalam situasi darurat atau ketika terjadi fluktuasi harga pangan. Program ini dikelola oleh Badan Pangan Nasional (BAPANAS) dan Perum Bulog, yang bertanggung jawab dalam pengadaan dan distribusi beras dari stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat, terutama pada saat-saat sulit. Dengan memberikan bantuan beras, pemerintah

berupaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan ini juga berfungsi untuk mengendalikan harga beras di pasar agar tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

Bantuan pangan beras disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam basis data yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Setiap KPM biasanya menerima 10 kilogram beras. Penyaluran dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk PT Pos Indonesia dan perusahaan logistik lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus yang dipadukan dengan penelitian kualitatif. Informasi deskriptif dari subjek dan pelaku yang diamati, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, merupakan komponen kunci penelitian kualitatif. Metode studi kasus digunakan untuk menyelidiki suatu kasus yang perlu dibedakan dari kasus lain dalam beberapa hal. Untuk mengkarakterisasi situasi yang mereka analisis, para peneliti melakukan penelitian ekstensif. Diperlukan observasi langsung bagi peneliti; bahkan ada yang bertindak

seolah-olah mereka adalah bagian dari objek dan subjek penelitian.

Penelitian dilakukan di Desa Ngerangan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, dengan melakukan wawancara kepada Ibu Kurniasari selaku Kasi Pelayanan Desa Ngerangan dan Ibu Anik Muslimah, selaku warga masyarakat desa di wilayah Desa Ngerangan. *Purposive sampling* digunakan untuk mengidentifikasi informan. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dimana peneliti memilih sampel berdasarkan pemahamannya terhadap sampel. Berdasarkan grid atau batas yang dipilih peneliti, sampel diambil secara acak. Selain itu, observasi partisipan dan studi dokumentasi digunakan dalam penelitian ini. Sumber data primer dan sekunder digunakan. Survei, wawancara, dan observasi merupakan sumber data primer, sedangkan database, laporan pemerintah, publikasi ilmiah, dan sumber informasi internet merupakan sumber data sekunder. Teknik analisis model interaksi Miles B. Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles et al., 2014).

Ada tiga langkah analisis kualitatif yang digunakan dalam teknik analisis data penelitian ini, yaitu proses seleksi yang menitikberatkan pada pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan

pengabstraksian, dan perubahan materi kasar yang muncul dari catatan lapangan. Pada fase ini, peneliti akan menyusun, mengorganisasikan, dan memisahkan data-data yang penting dan berkaitan dengan penelitian dari data-data yang tidak diperlukan. *Data Display* juga dikenal sebagai penyajian data adalah teknik utama analisis kualitatif yang sah. Ini adalah penyajian data yang ringkas sebagai kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan adanya potensi pembentukan kesimpulan. Dari penyajian data di atas, peneliti berupaya mengetahui makna suatu objek, mencatat keteraturan, pola, penjelasan, konfigurasi, dan alur sebab-akibat, serta proposisi. Peneliti kemudian memverifikasi kesimpulan yang diambil dari data tersebut. Menentukan dengan jelas kebenaran dan kegunaan interpretasi yang diperoleh dari data memerlukan pengujian kebenaran, kekokohan, dan kesesuaian, yang membentuk validitasnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berkurangnya produksi beras dalam negeri akibat serangan hama dan perubahan iklim merupakan kekhawatiran yang signifikan. Karena ketidakmampuan produksi dalam negeri untuk memenuhi seluruh kebutuhan pangannya, Indonesia hampir selalu bergantung pada impor pangan. Untuk pertama kalinya sejak krisis

keuangan tahun 1997, pemerintah akan mengimpor 3,5 juta ton beras pada tahun 2023. Angka ini meningkat cukup besar dibandingkan tahun 2022 yang hanya mengimpor 429 ribu ton (BPS, 2024). Dua hal yang tidak dapat dipisahkan adalah besarnya permintaan beras di Indonesia dan dampak impor beras pemerintah terhadap harga beras dalam negeri.

Sejak tahun 2002, pemerintah telah mengoperasikan program bantuan pangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional. Program subsidi pangan ini awalnya disebut Raskin (beras miskin), tetapi pada tahun 2015 berganti nama menjadi Rastra. Namun, program ini mulai mengalami perubahan besar. pada tahun 2017 ketika subsidi pangan dialihkan menjadi Bantuan Sosial (Bansos) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Rachman dkk., 2017). al, 2018). Kebijakan program-program ini terus berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Dukungan pangan beras, yang merupakan salah satu komponen program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), merupakan salah satu inisiatif terbaru pada tahun 2024. Program pada tahun 2023 akan dialihkan ke dalam program ini.

Upaya pemerintah untuk menerapkan kebijakan intervensi yang berbeda menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengubah atau meningkatkan perekonomian lokal guna meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan dan menjamin bahwa masyarakat miskin dapat menjalani kehidupan yang terhormat (Tumbel dkk, 2021). Menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat menjadi tujuan utama program bantuan pangan beras CPP, terutama mengingat kemungkinan terjadinya cuaca ekstrem seperti El Nino. Sepuluh kilogram beras akan dipasok antara Januari dan Juni 2024. Sasaran program bantuan pangan adalah 22.004.077 KPM, yang terdiri dari 6.878.649 keluarga dalam desil 1, 7.474.796 keluarga dalam desil 2, dan 7.650.632 keluarga dalam desil 3 (Badan Pangan Nasional, 2024).

Di Desa Ngerangan Kecamatan Bayat, program bantuan pangan beras CPP ini direalisasikan dalam 2 (dua) tahapan dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kurang lebih 800 KK. Berdasarkan hasil konferensi internal yang diselenggarakan pada 6 November 2023 dan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, data P3KE akan menjadi landasan dalam menetapkan tujuan penyaluran Bantuan Pangan Beras CPP. Segala upaya pemberdayaan dan bantuan pemerintah

yang berkaitan dengan masyarakat miskin tidak lagi hanya mengandalkan DTKS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, menyusul implementasi instruksi tersebut. Sasaran penyaluran program-program tersebut, khususnya pada Program Bantuan CPP Tanaman Padi Tahun 2024, juga ditentukan dengan menggunakan data P3KE. Untuk mengevaluasi Program Bantuan Pangan Beras CPP menggunakan model evaluasi *Result Based Management* (RBM).

### **Analisis Model Evaluasi Result Based Management (RBM)**

*Result-Based Management* (RBM) adalah pendekatan manajerial yang berfokus pada hasil dan dampak dari suatu program atau proyek. RBM menekankan pentingnya fokus pada hasil yang nyata dan terukur, serta mendorong pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program atau proyek. Dengan menggunakan model ini, organisasi dapat memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif untuk mencapai dampak yang diinginkan. Siklus dari RBM ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu fase *Planning*, fase *Monitoring*, dan fase *Evaluation*. Distribusi bantuan pangan beras CPP dan penggunaan data P3KE sebagai sasaran penerima bantuan merupakan dua

indikator utama yang digunakan dalam pendekatan RBM untuk menilai program sehubungan dengan bantuan pangan beras CPP tahun 2024. Dalam penelitian ini berfokus pada siklus RBM fase *Evaluation*. Pada fase *evaluation* terdapat *input*, *activity*, *output*, *outcome* serta *impact*.

### **Indikator *Input***

Indikator *Input* adalah untuk mengukur sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan suatu program. Indikator input yang diukur mencakup jumlah beras dan jumlah tenaga kerja dalam pelaksanaan program. Jumlah beras yang didistribusikan ialah 10 (sepuluh) kilogram beras per KPM. Jumlah sasaran dari program CPP di Desa Ngerangan adalah kurang lebih 800 KK, sasaran ini harus ada dalam data P3KE desil 1, desil 2, dan desil 3. Proses distribusi dilakukan oleh 6 (enam) perangkat Desa Ngerangan dan dibantu oleh petugas PKH desa Ngerangan. Sumber daya yang digunakan pada indikator *input* sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan. Dimana jumlah beras yang didistribusikan dan kriteria KPM tercantum di dalamnya. Dalam indikator *input* ini terdapat kendala kurangnya jumlah petugas pendistribusi di

desa yang menyebabkan pelayanan kurang optimal, sehingga hal ini mengakibatkan proses pada verifikasi data berjalan dengan lambat.

### **Indikator *Activity***

Indikator *Activity* adalah untuk mengukur kegiatan yang dilakukan dalam program. Program CPP di Desa Ngerangan dilaksanakan dalam dua tahapan. Tahap pertama dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali dari bulan Januari sampai dengan Mei. Pada tahap kedua dilaksanakan 2 (dua) bulan sekali yaitu pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember. Tahapan penyaluran program CPP terlaksana dengan lancar, yang mana perangkat desa mendapatkan pemberitahuan atau informasi dari Badan Pangan Nasional (BAPANAS) mengenai jumlah beras yang diterima, waktu distribusi, mekanisme pendistribusian, dan sasaran penerima program CPP. Kemudian perangkat desa menyebarkan undangan penerima program CPP kepada masyarakat penerima melalui RT/RW setempat. Dalam proses penyaluran program CPP perangkat desa melakukan verifikasi data bahwa masyarakat yang menerima termasuk dalam data P3KE. Dalam penyaluran program CPP juga dilakukan verifikasi data penggantian penerima program CPP bagi yang sudah meninggal, pindah domisili, tidak ditemukan alamatnya,

sudah mampu, dan yang menolak menerima bantuan. Dalam proses pengambilan program CPP, masyarakat yang terdaftar sebagai penerima diwajibkan membawa *fotocopy* Kartu Keluarga (KK), *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan undangan. Adapun kendala pada indikator ini adalah masyarakat tidak memperhatikan syarat apa saja yang harus dibawa pada saat pengambilan program CPP dan pada saat diminta untuk mengambil syarat yang diperlukan terlebih dahulu masyarakat tidak mau sehingga memperlambat proses pengambilan program CPP, dan masyarakat kurang tertib dalam mengikuti langkah sistem pengambilan program CPP sehingga menyebabkan ketidaksesuaian data dan menyulitkan petugas pendistribusi untuk mencari penerima dan mencocokkan datanya.

### **Indikator *Output***

Indikator *Output* adalah untuk mengukur hasil langsung dari kegiatan yang dilakukan. Program bantuan pangan beras CPP dapat berhasil jika sasarannya ditetapkan dengan tepat dan penyaluran bantuan dilakukan secara efektif sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Namun situasi yang muncul dimana kondisi penerima bantuan pangan beras CPP tidak tercermin dalam data penerima program CPP menunjukkan bahwa

program ini belum cukup mencapai tujuannya. Meskipun data P3KE digunakan untuk menetapkan sasaran penerima manfaat, namun lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara masyarakat kurang mampu dengan sasaran yang telah ditetapkan. Kontroversi yang terjadi antara pemerintah desa dan masyarakat menunjukkan betapa tidak akuratnya program ini dalam mencapai tujuannya. Untuk memastikan bahwa bantuan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dengan cara yang tepat dan efektif, maka sangat penting untuk mengkaji secara menyeluruh proses penetapan sasaran dan pelaksanaan program. Dalam upaya mengatasi kerawanan pangan, kemiskinan, stunting dan malnutrisi, keadaan darurat, menjaga produsen dan konsumen, serta menurunkan dampak inflasi, program CPP menyediakan 10 kg beras untuk setiap KPM, sehingga meringankan beban keuangan penerima bantuan pangan.

### **Indikator *Outcome***

Indikator *Outcome* adalah untuk mengukur perubahan yang terjadi sebagai hasil dari output. Secara konseptual, program bantuan pangan beras CPP sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang saat ini mengalami kegagalan panen. Ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menemukan kebutuhan mendesak untuk

memberikan bantuan pangan kepada masyarakat yang terdampak. Dari segi *outcome*, program CPP telah terpenuhi karena kegagalan panen sehingga membuat masyarakat merasa senang dan memanfaatkan hasil yang didapatkan yaitu beras 10 kg untuk bertahan hidup setelah mengalami kegagalan panen dengan cara mengkonsumsinya. Maka dari segi indikator *outcome* program CPP ini dikatakan berhasil dalam mengatasi permasalahan kebutuhan beras masyarakat akibat kegagalan panen yang dialami oleh masyarakat Desa Ngerangan. Dimana masyarakat memanfaatkan hasil dari program CPP untuk menyambung hidup setelah kegagalan panen.

### **Indikator *Impact***

Indikator *Impact* adalah mengukur dampak jangka panjang dari program bantuan pangan beras CPP pada masyarakat. Masyarakat merasa terbantu dan senang dengan adanya program bantuan pangan beras CPP ini. Hal ini dikarenakan pada saat yang sama masyarakat Desa Ngerangan mengalami gagal panen dan pada tahun 2024 petani tidak panen sama sekali, sehingga masyarakat Desa Ngerangan merasa terbantu dengan adanya program tersebut. Namun, program CPP ini hanya menjawab kebutuhan masyarakat akibat fenomena El Nino dan kegagalan panen, untuk jangka

panjang program CPP ini kurang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat untuk masa mendatang setelah kebijakan program CPP ini dihentikan. Untuk kebijakan selanjutnya pemerintah masih perlu mempertimbangkan jangan hanya memberikan kebutuhan sekarang, tetapi memberikan solusi, sosialisasi atau penyuluhan untuk menanggulangi supaya tidak ada kegagalan panen lagi untuk kedepannya dan untuk memandirikan masyarakat supaya tidak bergantung pada program bantuan pemerintah yang bersifat langsung.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Evaluasi kebijakan ketahanan pangan program bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) menggunakan model evaluasi *Result Based Management* (RBM) dengan indikator *input*, *activity*, *output*, *outcome* serta *impact*. Hasil penelitian menunjukkan pada indikator *Input*, jumlah beras yang didistribusikan ialah 10 (sepuluh) kilogram beras per KPM dengan sasaran 800 KK dari 1000 KK di Desa Ngerangan. Jumlah pendistribusi terdiri dari 6 perangkat desa dan petugas PKH. Terdapat kendala pada indikator *Input* yaitu kurangnya jumlah petugas pendistribusi di desa yang menyebabkan pelayanan kurang optimal, sehingga hal ini mengakibatkan proses pada verifikasi data berjalan dengan

lambat. Indikator *Activity*, program CPP dilaksanakan dalam dua tahapan dan pelaksanaannya berjalan dengan lancar sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022. Terdapat kendala pada indikator *Activity* dimana masyarakat kurang tertib dalam mengikuti langkah sistem pengambilan program CPP sehingga menyebabkan ketidaksesuaian data dan menyulitkan petugas. Indikator *Output*, menunjukkan bahwa hasil dari program CPP setiap KPM mendapatkan beras sepuluh kilogram dan belum sepenuhnya mencapai sasaran secara efektif dimana kondisi masyarakat yang seharusnya mendapatkan program bantuan pangan beras CPP tidak termasuk dalam data P3KE. Pada indikator *Outcome*, program bantuan pangan beras CPP sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini yang mengalami kegagalan panen. Masyarakat memanfaatkan beras 10 kg untuk bertahan hidup setelah mengalami kegagalan panen dengan cara mengkonsumsinya. Serta pada indikator *Impact*, masyarakat merasa terbantu dan senang dengan adanya program bantuan pangan beras CPP ini karena mengalami kegagalan panen. Namun, program CPP ini hanya menjawab kebutuhan masyarakat akibat fenomena El Nino dan kegagalan panen, untuk jangka panjang program CPP ini kurang mempertimbangkan kesiapan

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Secara keseluruhan, kebijakan bantuan pangan beras CPP tahun 2024 terlaksana dengan lancar, namun untuk menetapkan sasaran penerima belum tepat sasaran sesuai dengan keadaan di lingkungan. Karena pengetahuan mereka yang lebih luas mengenai situasi lokal, partisipasi pemerintah desa dan daerah dalam proses ini sangatlah penting. Dalam menjamin keakuratan dan keterapan data P3KE, dapat dilakukan pemutakhiran secara berkala dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan daerah. Pemerintah desa harus memiliki akses terhadap sistem informasi yang mencakup data P3KE. Rancangan sistem ini harus memfasilitasi akses, pemutakhiran, dan verifikasi data secara berkala oleh pemerintah desa. Perubahan data dapat diselesaikan secara efektif dan konsisten dengan sistem informasi yang terintegrasi sehingga menghasilkan informasi yang lebih relevan dan akurat.

## REFERENSI

- Adji, Ardi, et al. (2022). Pemingkatan Kesejahteraan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
- Badan Pangan Nasional. (2023). Bantuan Pangan Beras 2024 Gunakan Data P3KE Kemenko PMK, Kepala NFA: Demi Penyaluran Tepat Sasaran, Kita Terapkan By Name By Address dan By Picture serta NIK.

- Badan Pangan Nasional. (2024). Jangan Keliru, Ini Perbedaan Bantuan Pangan Beras dengan Bantuan Sosial Lainnya.
- BPS. (2024). Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Produsen Gabah Februari 2024. Badan Pusat Statistik, 47, 2–20.
- Danil K, N. (2024). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa (Doctoral dissertation, IPDN).
- Distan Kota Serang. (2023). Penyaluran Cadangan \Pangan Pemerintah Cpp Untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2023.
- Hutahaean, R., & Dompok, T. (2024). Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Ketahanan Pangan. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration* Silampari, 6(1), 41-46.
- Kemenko Perekonomian RI. (2024). Turut Berperan Menjaga Tingkat Inflasi Nasional dan Antisipasi Dampak El Nino, Program Bantuan Pangan Beras Terus Dilanjutkan.
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: a Methodes Sorcebook* (3rd ed.). Sage Publicatin, Inc NewYork.
- Munyaradzi, Rwakurumbira. (2024). Introduction To Results Based Management (RBM).
- Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.
- Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi.
- Perpres No 66 Tahun 2021 tentang pembentukan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
- Putranto, W. W. (2021). Analisis Hubungan El Niño dengan Kekeringan Meteorologis dan Dampaknya Terhadap Produksi Padi di Provinsi Bali. *Megasains*, 12(2), 1-10.
- Rachman, B., Agustian, A., & Wahyudi, N. (2018). Effectiveness and Perspective of Rice for the Poor and Non-Cash Food Assistance (BPNT) Programs. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 16(1), 1–18.
- Saefudin. (2023). Strategi perencanaan menghadapi krisis pangan dan el nino. *Warta BSIP Perkebunan*, 1(3), 21–30.
- Saukani, S., Raudah, S., & Barkatullah, B. (2024). Efektivitas Program Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Cpp) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(4), 941-950.
- Stepantoro, Benedictus Dwiagus. (2023). Results-Based Management (RBM) dalam Monitoring dan Evaluasi (MONEV).
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2022). Peningkatan kesejahteraan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
- Triani, E., & Magello, A. N. (2024). Optimalisasi Program Bantuan Langsung Tunai dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Terdampak Fenomena El Nino di Indonesia. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 3(1), 17-24.
- Tumbel, R., Kiyai, B., & Mambo, R. (2021). Dampak Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. *Dampak Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa*, iii(110), 79–92.
- Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan.

United Nations Development Group. (2011). Results-Based Management Handbook.